



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 013 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (10) [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah ditetapkan dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018](#), namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009](#) tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018](#) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
7. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
8. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
10. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.

11. Jalur ...

11. Jalur Prestasi Nilai Ujian adalah jalur yang menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.
12. Jalur Prestasi Perlombaan adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
13. Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RMP adalah Calon Peserta Didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan data warga miskin dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
14. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan mencakup Paket A, B dan C.
17. Sekolah ...

17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C. Paket A setara SD; Paket B setara SMP; dan Paket C setara SMA.
21. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
22. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP, dan/atau sederajat.
23. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
24. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan Standar Nasional.

25. Nilai ...

25. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN yang terdiri sejumlah mata pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dicantumkan dalam daftar nilai ujian.
26. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil USBN yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
27. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US dan USBN pada tingkat Satuan Pendidikan.
28. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
29. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
31. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang dituju dalam zona yang tertentu.
32. Kuota Zonasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak terdekat dengan Sekolah.

BAB ...

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 5

Dinas dan Sekolah wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Satu Sistem PPDB *online*.
- (2) PPDB *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi PPDB yang dikembangkan Dinas berdasarkan norma PPDB yang ditetapkan Wali Kota dan Dinas, dipergunakan untuk PPDB SD, dan PPDB SMP.
- (3) Hasil PPDB *online* merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing Sekolah, diumumkan serempak, transparan, dan akuntabel secara *online*.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil PPDB *online* diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, sebagai peserta didik di Sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke Sekolah yang dituju secara individual.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur:

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, didasarkan pada zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona A, zona B, zona C dan zona D, yang memuat daftar Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam radius 500 meter ke Sekolah yang dituju namun berbeda zona maka termasuk satu zona dengan Sekolah tersebut.

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam satu zona.

(2) Selain ...

- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zona domisili peserta didik.
- (3) Calon Peserta Didik berhak memilih Sekolah negeri paling banyak 2 (dua) pilihan dalam 1 (satu) zona.
- (4) Calon Peserta Didik jalur zonasi dapat mendaftar ke Sekolah swasta sebagai pilihan ketiga.

Pasal 11

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili;
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) kuota zonasi terdekat berdasarkan kombinasi); dan
 - c. paling sedikit 20% (dua puluh persen) kuota zonasi terdekat berdasarkan RMP.
- (3) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk kuota PDBK paling banyak 3 orang.
- (4) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan alamat pada kartu keluarga yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan kartu keluarga dan SHUSBN.
- (6) Kuota ...

- (6) Kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota dan kartu keluarga yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 12

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dapat menerima calon peserta didik kuota jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kuota prestasi nilai ujian dan kuota prestasi perlombaan atau penghargaan dibuktikan dengan sertifikat yang dilegalisasi oleh pihak berwenang.
- (3) Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 13

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dapat menerima calon peserta didik kuota jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 14

- (1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas dan Sekolah.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah harus menyediakan kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dalam sistem PPDB *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuota PPDB *online* bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai pengajuan dari penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 16

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru pada TK adalah:
- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru TK adalah:
- a. kutipan akta kelahiran; dan
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 17

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
- a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (5) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD adalah:
- a. kutipan akta kelahiran;
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal ...

Pasal 18

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SMP adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran; dan
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 19

- (1) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikecualikan bagi PDBK.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) berlaku juga bagi peserta didik RMP.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a. usia ...

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 21

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan domisili dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan kombinasi dilakukan dengan penjumlahan pembobotan skor jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan dan nilai USBN.

(4) Jika ...

- (4) Jika total penjumlahan pembobotan jarak tempat tinggal dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (5) Skor jarak berdasarkan kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran II Peraturan Wali Kota ini
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan RMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan.
- (7) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi nilai ujian dilakukan berdasarkan nilai USBN.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi nilai ujian, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki nilai USBN sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
- (4) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat.
- (5) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 25

Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke Sekolah, ditentukan dengan instrument berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kelima

Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 26

- (1) Hasil sementara PPDB ditayangkan secara *online*, sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.
- (2) Hasil akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada sistem PPDB *online* sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.

Pasal 27

- (1) Hasil akhir sistem PPDB *online* ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB *online* menjadi peserta didik sekolah masing-masing.

(3) Calon ...

- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB *online* diwajibkan daftar ulang ke sekolah yang menerima.
- (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB *online* tidak melakukan daftar ulang di Sekolah, maka pengisian kuota dilakukan oleh Sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.
- (5) Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Jawa Barat, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang dikenakan pungutan dan/atau pembebanan sumbangan.

Pasal ...

Pasal 29

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah Kota setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima sebagai peserta didik di SMP di Daerah Kota setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain ke Sekolah di Daerah Kota wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Sekolah ...

- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah Kota; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 32

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 33

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 34

- (1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kota.

BAB VI

SEKOLAH PERBATASAN

Pasal 35

- (1) Calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah Kota hanya dapat memilih pada Sekolah perbatasan.
- (2) Sekolah perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain.
- (3) Sekolah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

(4) Kuota ...

- (4) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SD bagi calon peserta didik dari luar Daerah Kota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah total kuota keseluruhan.
- (5) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SMP bagi calon peserta didik dari luar Daerah Kota paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah total kuota keseluruhan.
- (6) Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kota dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, pada tahun ajaran 2019/2020 wajib melaksanakan *sistem PPDB online*, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1).
- (2) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

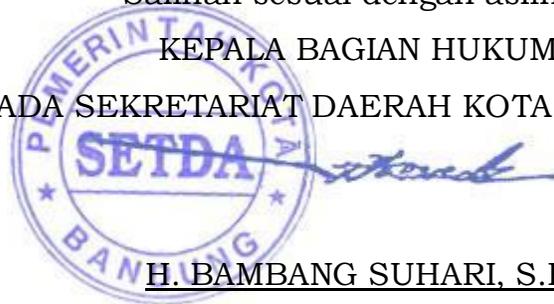
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



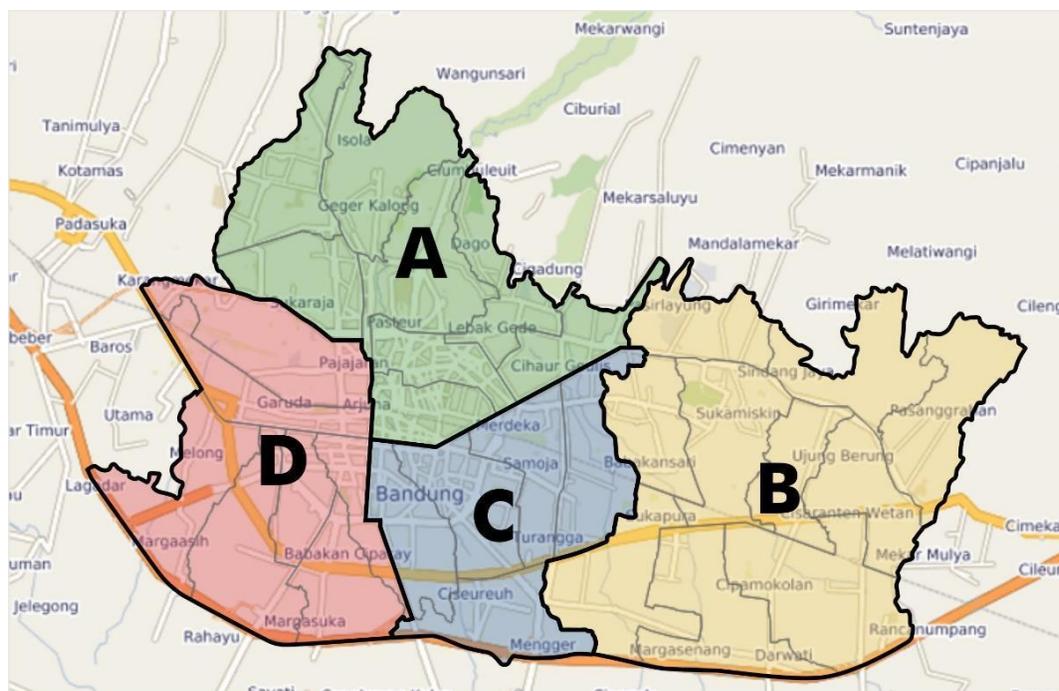
H. BAMBANG SUHARI, S.H

NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 013 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 Maret 2019

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Lampiran 1. Peta Zona Sekolah



A. Taman Kanak-kanak

No	Zona	Nama Sekolah	Kecamatan
1	A	TK. Negeri Sadang Serang	Kec. Coblong
2	C	TK. Negeri Centeh	Kec. Batununggal
3	D	TK. Negeri Citarip.	Kec. Bojong Loa Kaler
4	C	Rintisan TK Negeri Batununggal	Kec. Batununggal
5	B	Rintisan TK Negeri Panyileukan	Kec. Panyileukan

B. Sekolah Dasar

No	Zona	Nama Sekolah	Kecamatan
1	A	SDN 001 MERDEKA KOTA BANDUNG	Kec. Sumur Bandung
2		SDN 007 CIPAGANTI KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
3		SDN 010 CIDADAP KOTA BANDUNG	Kec. Cidadap
4		SDN 018 SUKAGALIH KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
5		SDN 022 CICALAS KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
6		SDN 024 COBLONG KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
7		SDN 025 CIKUTRA KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kaler
8		SDN 027 CICALAS KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
9		SDN 030 CIRATEUN KOTA BANDUNG	Kec. Cidadap
10		SDN 031 PELESIRAN KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
11		SDN 032 TILIL KOTA BANDUNG	Kec. Coblong

12	SDN 034 PATRAKOMALA KOTA BANDUNG	Kec. Sumur Bandung
13	SDN 035 SOKA KOTA BANDUNG	Kec. Sumur Bandung
14	SDN 037 SABANG KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Wetan
15	SDN 043 CIMUNCANG KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
16	SDN 044 CICADAS AWIGOMBONG KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
17	SDN 048 SIRNAMANAH KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
18	SDN 053 CISITU KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
19	SDN 054 TIKUKUR KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
20	SDN 062 CIUJUNG KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Wetan
21	SDN 064 PADASUKA KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
22	SDN 065 CIHAMPELAS KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
23	SDN 071 SUKAGALIH KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
24	SDN 072 SUKASARI KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
25	SDN 076 SUKAJADI KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
26	SDN 077 SEJAHTERA KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
27	SDN 082 MUARARAJEUN KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kaler
28	SDN 085 CIUMBULEUIT KOTA BANDUNG	Kec. Cidadap
29	SDN 088 EMBONG KOTA BANDUNG	Kec. Sumur Bandung
30	SDN 096 SARIJADI SELATAN KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
31	SDN 097 CIRATEUN KULON KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
32	SDN 100 CIPEDES KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
33	SDN 103 COBLONG KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
34	SDN 104 LANGENSARI SENANGGALIH KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
35	SDN 108 CIUMBULEUIT KOTA BANDUNG	Kec. Cidadap
36	SDN 113 BANJARSARI KOTA BANDUNG	Kec. Sumur Bandung
37	SDN 114 BOJONGKONENG CIBEUNYING KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
38	SDN 127 SEKELOA KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
39	SDN 128 HAURPANCUH KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
40	SDN 132 CIHAURGEULIS KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kaler
41	SDN 133 JALAN ANYAR KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
42	SDN 134 PANORAMA KOTA BANDUNG	Kec. Cidadap
43	SDN 136 SUKAWARNA KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
44	SDN 137 CIJEROKASO KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
45	SDN 138 GEGERKALONG GIRANG KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
46	SDN 139 SUKARASA KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
47	SDN 149 CIGADUNG KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kaler
48	SDN 150 GATOT SUBROTO KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
49	SDN 151 SUKASENANG KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
50	SDN 173 NEGLASARI KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
51	SDN 176 CILANDAK KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
52	SDN 177 CIPEDES KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
53	SDN 178 GEGERKALONG KPAD KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
54	SDN 179 SARIJADI KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
55	SDN 185 CIHAURGEULIS KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kaler
56	SDN 188 BANDUNG BARU KOTA BANDUNG	Kec. Cidadap
57	SDN 189 NEGLASARI KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
58	SDN 193 CARINGIN KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
59	SDN 194 SUKAJADI KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi

60	SDN 195 ISOLA KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
61	SDN 196 SUKARASA KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
62	SDN 201 SUKALUYU KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kaler
63	SDN 204 CIDADAP KOTA BANDUNG	Kec. Cidadap
64	SDN 205 NEGLASARI KOTA BANDUNG	Kec. Coblong
65	SDN 207 CIBOGO KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
66	SDN 208 LUGINASARI SUKAGALIH KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
67	SDN 212 HARAPAN KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
68	SDN 217 SARIJADI KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
69	SDN 218 SARIJADI KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
70	SDN 234 SALUYU KOTA BANDUNG	Kec. Cibeunying Kidul
71	SDN 252 SETIABUDI KOTA BANDUNG	Kec. Sukasari
72	SDN 272 SUKASARI KOTA BANDUNG	Kec. Sukajadi
73	SDN 004 CISARANTEN KULON KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
74	SDN 006 BUAHBATU KOTA BANDUNG	Kec. Buahbatu
75	SDN 009 CIKADUT KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
76	SDN 021 CIPOREAT KOTA BANDUNG	Kec. Ujungberung
77	SDN 029 CILENGKRANG KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
78	SDN 036 UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG	Kec. Ujungberung
79	SDN 046 SINDANGLAYA KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
80	SDN 050 CIBIRU KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
81	SDN 052 CISARANTEN WETAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG	Kec. Cinambo
82	SDN 055 JATIHANDAP KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
83	SDN 057 BINA HARAPAN KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
84	SDN 068 SINDANGLAYA KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
85	SDN 069 CIPAMOKOLAN DERWATI KOTA BANDUNG	Kec. Rancasari
86	SDN 078SINDANGSARI ANTAPANI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
87	SDN 084 CIKADUT KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
88	SDN 086 CIMINCRANG KOTA BANDUNG	Kec. Gedebage
89	SDN 087 RANCABOLANG KOTA BANDUNG	Kec. Rancasari
90	SDN 090 CIBIRU KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
91	SDN 095 BABAKANJATI KOTA BANDUNG	Kec. Buahbatu
92	SDN 101 SUKAKARYA KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
93	SDN 102 CIKUDAYASA KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
94	SDN 105 SUKARELA KOTA BANDUNG	Kec. Panyileukan
95	SDN 106 AJITUNGGAL CIJAMBE KOTA BANDUNG	Kec. Ujungberung
96	SDN 107 PALEDANG KOTA BANDUNG	Kec. Ujungberung
97	SDN 122 CIJAWURA KOTA BANDUNG	Kec. Rancasari
98	SDN 124 HANURA KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
99	SDN 125 TARUNA KARYA KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
100	SDN 129 RANCASAWO MARGASARI KOTA BANDUNG	Kec. Buahbatu
101	SDN 131 CIJAWURA KOTA BANDUNG	Kec. Buahbatu
102	SDN 140 ARCAMANIK KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
103	SDN 141 LOKAJAYA KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
104	SDN 152 CIGAGAK KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
105	SDN 153 TARUNA KARYA KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
106	SDN 165 JATIHANDAP KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
107	SDN 168 CIPADUNG KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru

B

108	SDN 169 PELITA KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
109	SDN 172 ANDIR KIDUL KOTA BANDUNG	Kec. Cinambo
110	SDN 174 PASIR IMPUN KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
111	SDN 175 TANJAKAN KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
112	SDN 180 PRAKARSA NUGRAHA KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
113	SDN 181 SUKAMISKIN KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
114	SDN 184 BUAHBATU KOTA BANDUNG	Kec. Buahbatu
115	SDN 186 CIPADUNG KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
116	SDN 190 CISARANTEN KIDUL KOTA BANDUNG	Kec. Gedebage
117	SDN 198 MEKARJAYA KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
118	SDN 209 ANTAPANI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
119	SDN 215 RANCASAGATAN KOTA BANDUNG	Kec. Gedebage
120	SDN 216 SONDARIAH KOTA BANDUNG	Kec. Gedebage
121	SDN 222 PASIRPOGOR KOTA BANDUNG	Kec. Rancasari
122	SDN 224 CIJAMBE KOTA BANDUNG	Kec. Ujungberung
123	SDN 225 MEKARGALIH KOTA BANDUNG	Kec. Ujungberung
124	SDN 226 ARCAMANIK ENDAH KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
125	SDN 230 MARGAHAYU RAYA KOTA BANDUNG	Kec. Buahbatu
126	SDN 231 SUKAASIH KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
127	SDN 242 MARGASARI KOTA BANDUNG	Kec. Buahbatu
128	SDN 243 CICABE KOTA BANDUNG	Kec. Mandalajati
129	SDN 244 GURUMINDA KOTA BANDUNG	Kec. Arcamanik
130	SDN 246 MARGACINTA KOTA BANDUNG	Kec. Buahbatu
131	SDN 247 SUKAPURA KOTA BANDUNG	Kec. Cibiru
132	SDN 248 SINDANGSARI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
133	SDN 253 PANGGUNGSARI KOTA BANDUNG	Kec. Ujungberung
134	SDN 254 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
135	SDN 255 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
136	SDN 258 SUKARELA KOTA BANDUNG	Kec. Panyileukan
137	SDN 259 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
138	SDN 260 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
139	SDN 261 MARGAHAYU RAYA KOTA BANDUNG	Kec. Buahbatu
140	SDN 262 PANYILEUKAN KOTA BANDUNG	Kec. Panyileukan
141	SDN 263 RANCALOA KOTA BANDUNG	Kec. Rancasari
142	SDN 264 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
143	SDN 267 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
144	SDN 268 PANYILEUKAN KOTA BANDUNG	Kec. Panyileukan
145	SDN 269 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG	Kec. Antapani
146	SDN 271 PANGHEGAR KOTA BANDUNG	Kec. Panyileukan
147	SDN 274 CEMPAKA ARUM KOTA BANDUNG	Kec. Gedebage
148	SDN 008 MOHAMAD TOHA KOTA BANDUNG	Kec. Regol
149	SDN 017 SEKEJATI KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong
150	SDN 020 LENGKONG BESAR KOTA BANDUNG	Kec. Regol
151	SDN 028 GUMURUH KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal
152	SDN 033 ASMI KOTA BANDUNG	Kec. Regol
153	SDN 038 KIARACONDONG KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong
154	SDN 040 PASAWAHAN KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kidul
155	SDN 042 GAMBIR KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal
156	SDN 047 BALONGGEDE KOTA BANDUNG	Kec. Regol

C

157	SDN 063 KEBON GEDANG KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal	
158	SDN 066 HALIMUN KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
159	SDN 067 NILEM KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
160	SDN 070 PASIRLUYU KOTA BANDUNG	Kec. Regol	
161	SDN 081 KEBON GEDANG KRIDAWINAYA KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal	
162	SDN 083 BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
163	SDN 094 PARAKANWAAS KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kidul	
164	SDN 109 CENTEH KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal	
165	SDN 111 PINDAD KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
166	SDN 112 PAMOYANAN KOTA BANDUNG	Kec. Regol	
167	SDN 115 TURANGGA KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
168	SDN 116 CICAHEUM KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
169	SDN 117 BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kidul	
170	SDN 119 CIJAGRA KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
171	SDN 120 KOTABARU KOTA BANDUNG	Kec. Regol	
172	SDN 123 BABAKAN PRIANGAN KOTA BANDUNG	Kec. Regol	
173	SDN 130 SEKELIMUS BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kidul	
174	SDN 135 TURANGGA KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
175	SDN 145 BINONG JATI KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal	
176	SDN 146 GUMURUH KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal	
177	SDN 158 BABAKAN SARI BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
178	SDN 159 SEKEJATI KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
179	SDN 160 SUKALAKSANA KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
180	SDN 161 SUKAPURA KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
181	SDN 162 WARUNGJAMBU KIARACONDONG KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
182	SDN 163 BUAHBATU BARU KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
183	SDN 164 KARANGPAWULANG KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
184	SDN 166 CIATEUL KOTA BANDUNG	Kec. Regol	
185	SDN 167 MENGGER GIRANG KOTA BANDUNG	Kec. Regol	
186	SDN 191 BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
187	SDN 192 CIBURUY KOTA BANDUNG	Kec. Regol	
188	SDN 202 SURYALAYA KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
189	SDN 203 KACAPIRING KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal	
190	SDN 206 PUTRACO INDAH KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
191	SDN 210 BABAKAN SINYAR KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
192	SDN 211 BABAKAN PRIANGAN KOTA BANDUNG	Kec. Regol	
193	SDN 219 BABAKANJATI KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal	
194	SDN 220 GUMURUH KOTA BANDUNG	Kec. Batununggal	
195	SDN 221 BABAKAN SENTRAL KOTA BANDUNG	Kec. Kiaracondong	
196	SDN 223 BHAKTI WINAYA KOTA BANDUNG	Kec. Regol	
197	SDN 235 LENGKONG KECIL KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
198	SDN 250 JAKAPURWA KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kidul	
199	SDN 257 PELITA KOTA BANDUNG	Kec. Lengkong	
200	SDN 266 MENGGER KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kidul	
201	D	SDN 002 KARANGMULYA KOTA BANDUNG	Kec. Andir
202		SDN 003 PAGARSIH KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
203		SDN 005 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
204		SDN 011 CIBUNTU KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon

205	SDN 012 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
206	SDN 013 PASIRKALIKI KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
207	SDN 014 CIGONDEWAH KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
208	SDN 015 KRESNA KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
209	SDN 016 DR. CIPTO PAJAJARAN KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
210	SDN 019 PABAKI KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
211	SDN 023 PAJAGALAN KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
212	SDN 026 BOJONGLOA KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kidul
213	SDN 039 TEGALEGA KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
214	SDN 041 CIBUNTU WARUNG MUNCANG KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
215	SDN 045 PASIRKALIKI KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
216	SDN 049 DURMAN KOTA BANDUNG	Kec. Andir
217	SDN 051 PASIRKALIKI KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
218	SDN 056 GARUDA DADALI KOTA BANDUNG	Kec. Andir
219	SDN 058 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
220	SDN 059 CIRANGRANG KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
221	SDN 060 RAYA BARAT KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
222	SDN 061 CIJERAH KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
223	SDN 073 PAJAGALAN KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
224	SDN 074 AYUDIA KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
225	SDN 075 JATAYU KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
226	SDN 079 KOPO PAJAGALAN KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
227	SDN 080 BOJONG INDAH CIBUNTU KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
228	SDN 089 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
229	SDN 091 CIBEUREUM KOTA BANDUNG	Kec. Andir
230	SDN 092 CIBADAK ANDIR KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
231	SDN 093 TUNAS HARAPAN CIJERAH KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
232	SDN 098 CIROYOM KOTA BANDUNG	Kec. Andir
233	SDN 099 BABAKAN TAROGONG KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kaler
234	SDN 110 PASIRKALIKI KOMARABUDI KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
235	SDN 118 TANJUNG KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kaler
236	SDN 121 CARINGIN HOLIS KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
237	SDN 126 BABAKAN KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
238	SDN 142 DWIKORA KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
239	SDN 143 KOPO KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
240	SDN 144 SITUGUNTING KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
241	SDN 147 CITARIP BARAT KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kaler
242	SDN 148 CIBADUYUT KOTA BANDUNG	Kec. Bojongloa Kidul
243	SDN 154 CITEPUS KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
244	SDN 155 GUNUNG RAHAYU KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
245	SDN 156 PASIRKALIKI KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
246	SDN 157 SUKARAJA KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
247	SDN 170 DIAN KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
248	SDN 171 LANUMA HUSEIN KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
249	SDN 182 PERUMNAS CIJERAH KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
250	SDN 183 SAYURAN KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
251	SDN 187 LANUMA HUSEIN KOTA BANDUNG	Kec. Cicendo
252	SDN 197 KARANG TARUNA KARANGSARI KOTA BANDUNG	Kec. Andir

253	SDN 199 SAYURAN KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
254	SDN 200 LEUWIPANJANG KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kidul
255	SDN 213 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
256	SDN 214 PERUMNAS CIJERAH KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
257	SDN 227 MARGAHAYU UTARA KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
258	SDN 228 CANGKUANG KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kidul
259	SDN 229 CIBADUYUT KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kidul
260	SDN 232 BLOK SAWAH KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
261	SDN 233 CIBADUYUT KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kidul
262	SDN 236 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
263	SDN 237 KOPO ELOK KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
264	SDN 238 CIGONDEWAH KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
265	SDN 239 CIGONDEWAH KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
266	SDN 240 CIJERAH INDAH KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
267	SDN 241 LEUWIANYAR KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kidul
268	SDN 245 SUMBERSARI INDAH KOTA BANDUNG	Kec. Babakan Ciparay
269	SDN 249 ASTANAANYAR KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
270	SDN 251 JAMIKA KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kaler
271	SDN 256 CIGONDEWAH HILIR KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon
272	SDN 265 BANDUNGKULON KOTA BANDUNG	Kec. Astanaanyar
273	SDN 270 GENTRA MASEKDas KOTA BANDUNG	Kec. Bojong Loa Kaler
274	SDN 273 GEMPOL SARI KOTA BANDUNG	Kec. Bandung Kulon

2. Sekolah Menengah Pertama

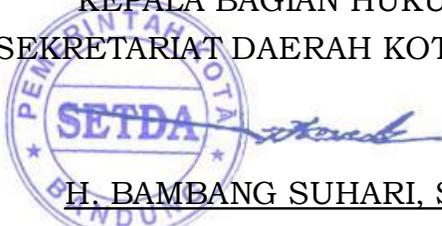
No	Zona	Sekolah	Kecamatan
1	A	SMP NEGERI 2	Kec. Sumur Bandung
2		SMP NEGERI 5	Kec. Sumur Bandung
3		SMP NEGERI 7	Kec. Bandung Wetan
4		SMP NEGERI 12	Kec. Sukasari
5		SMP NEGERI 14	Kec. Bandung Wetan
6		SMP NEGERI 15	Kec. Sukasari
7		SMP NEGERI 16	Kec. Cibeunying Kaler
8		SMP NEGERI 19	Kec. Coblong
9		SMP NEGERI 22	Kec. Cibeunying Kidul
10		SMP NEGERI 26	Kec. Sukajadi
11		SMP NEGERI 27	Kec. Cibeunying Kidul
12		SMP NEGERI 29	Kec. Sukasari
13		SMP NEGERI 35	Kec. Coblong
14		SMP NEGERI 40	Kec. Bandung Wetan
15		SMP NEGERI 44	Kec. Bandung Wetan
16		SMP NEGERI 52	Kec. Cidadap
17		SMP NEGERI 60	Kec. Cibeunying Kidul
18		SMP NEGERI 63	Kec. Cibeunying Kaler
19		SMP NEGERI 8	Kec. Ujungberung
20		SMP NEGERI 17	Kec. Arcamanik
21		SMP NEGERI 18	Kec. Buahbatu
22		SMP NEGERI 42	Kec. Buahbatu
23		SMP NEGERI 45	Kec. Antapani

24	B	SMP NEGERI 46	Kec. Cibiru	
25		SMP NEGERI 48	Kec. Rancasari	
26		SMP NEGERI 49	Kec. Antapani	
27		SMP NEGERI 50	Kec. Ujungberung	
28		SMP NEGERI 51	Kec. Rancasari	
29		SMP NEGERI 53	Kec. Mandalajati	
30		SMP NEGERI 54	Kec. Gedebage	
31		SMP NEGERI 56	Kec. Panyileukan	
32		SMP NEGERI 59	Kec. Mandalajati	
33		C	SMP NEGERI 3	Kec. Regol
34			SMP NEGERI 4	Kec. Batununggal
35			SMP NEGERI 10	Kec. Regol
36	SMP NEGERI 11		Kec. Regol	
37	SMP NEGERI 13		Kec. Lengkong	
38	SMP NEGERI 20		Kec. Batununggal	
39	SMP NEGERI 28		Kec. Lengkong	
40	SMP NEGERI 30		Kec. Kiaracondong	
41	SMP NEGERI 31		Kec. Batununggal	
42	SMP NEGERI 34		Kec. Bandung Kidul	
43	SMP NEGERI 37		Kec. Kiaracondong	
44	SMP NEGERI 43		Kec. Regol	
45	SMP NEGERI 61		Kec. Batununggal	
46	SMP NEGERI 62		Kec. Regol	
47	D	SMP NEGERI 1	Kec. Cicendo	
48		SMP NEGERI 6	Kec. Andir	
49		SMP NEGERI 9	Kec. Cicendo	
50		SMP NEGERI 21	Kec. Babakan Ciparay	
51		SMP NEGERI 23	Kec. Andir	
52		SMP NEGERI 24	Kec. Bojongloa Kaler	
53		SMP NEGERI 25	Kec. Astanaanyar	
54		SMP NEGERI 32	Kec. Andir	
55		SMP NEGERI 33	Kec. Bojong Loa Kaler	
56		SMP NEGERI 36	Kec. Babakan Ciparay	
57		SMP NEGERI 38	Kec. Bojong Loa Kidul	
58		SMP NEGERI 39	Kec. Babakan Ciparay	
59		SMP NEGERI 41	Kec. Andir	
60		SMP NEGERI 47	Kec. Cicendo	
61		SMP NEGERI 55	Kec. Bandung Kulon	
62		SMP NEGERI 57	Kec. Bandung Kulon	

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, S.H

NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 013 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 Maret 2019

PENSKORAN JARAK (ZONASI KOMBINASI)

No	JARAK / meter	SKOR
1	0-500	300
2	501-1000	290
3	1001-1500	280
4	1501-2000	270
5	2001-2500	260
6	2501-3000	250
7	3001-3500	240
8	3501-4000	230
9	4001-4500	220
10	4501-5000	210
11	5001-5500	200
12	5501-6000	190
13	6001-6500	180
14	6501-7000	170
15	>7001	160

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H

NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 013 TAHUN 2019
 TANGGAL :29 Maret 2019

Lampiran 3.1. PENSKORAN SERTIFIKAT KEJUARAAN DAN PENGHARGAAN

NO.	KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDIKBUD, KEMENAG DAN KEMENPORA	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	DITERIMA	DITERIMA
2	Juara 2 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	DITERIMA	DITERIMA
3	Juara 3 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	DITERIMA	DITERIMA
4	Juara 1 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
5	Juara 2 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
6	Juara 3 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
7	Juara 1 Provinsi	250	150
8	Juara 2 Provinsi	225	115
9	Juara 3 Provinsi	200	100
10	Juara 1 Tk. Kota	175	87
11	Juara 2 Tk. Kota	150	75
12	Juara 3 Tk. Kota	125	62

	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG/KEMENPORA	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International	125	95
	Juara 2 International	120	90
3	Juara 3 International	115	85
4	Juara 1 Asia	110	80
5	Juara 2 Asia	105	75
6	Juara 3 Asia	100	70
7	Juara 1 Asean	95	65
8	Juara 2 Asean	90	60
9	Juara 3 Asean	85	55
10	Juara 1 Nasional	80	50
11	Juara 2 Nasional	75	45
12	Juara 3 Nasional	70	40
13	Juara 1 Propinsi	65	35
14	Juara 2 Propinsi	60	30
15	Juara 3 Propinsi	55	25
16	Juara 1 Tk. Kota	50	20
17	Juara 2 Tk. Kota	45	15
18	Juara 3 Tk. Kota	40	10

Lampiran 3. 2. PENSKORAN PENGHARGAAN

PENGHARGAAN		PEMERINTAH		NON PEMERINTAH	
		PERORANGAN	BEREGU	PERORANGAN	BEREGU
1	Tingkat	-	-	250	150
2	Tingkat Asia	-	-	225	115
3	Tingkat Asean	-	-	200	100
4	Tingkat Nasional	250	150	175	87
5	Tingkat Propinsi	225	115	150	75
6	Tingkat Kota/Kab	200	100	125	62

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 013 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 Maret 2019

SEKOLAH PERBATASAN

Lampiran 4.1 Sekolah Dasar Perbatasan

NO	NAMA SEKOLAH
1	SDN 014 CIGONDEWAH
2	SDN 025 CIKUTRA
3	SDN 030 CIRATEUN
4	SDN 040 PASAWAHAN
5	SDN 045 PASIRKALIKI
6	SDN 050 CIBIRU
7	SDN 064 PADASUKA
8	SDN 069 CIPAMOKOLAN DERWATI
9	SDN 085 CIUMBULEUIT
10	SDN 090 CIBIRU
11	SDN 091 CIBEUREUM
12	SDN 097 CIRATEUN KULON
13	SDN 102 CIKUDAYASA
14	SDN 103 COBLONG
15	SDN 106 AJITUNGGAL CIJAMBE
16	SDN 114 BOJONG KONENG CIBEUNYING
17	SDN 122 CIJAWURA
18	SDN 124 HANURA
19	SDN 129 RANCASAWO MARGASARI
20	SDN 130 BATUNUNGGAL SEKELIMUS
21	SDN 131 CIJAWURA
22	SDN 138 GEGERKALONG GIRANG
23	SDN 149 CIGADUNG
24	SDN 155 GUNUNG RAHAYU
25	SDN 170 DIAN
26	SDN 174 PASIR IMPUN
27	SDN 175 TANJAKAN
28	SDN 178 KPAD
29	SDN 179 SARIJADI
30	SDN 182 PERUMNAS CIJERAH
31	SDN 183 SAYURAN
32	SDN 188 BANDUNG BARU
33	SDN 192 CIBURUY
34	SDN 199 SAYURAN
35	SDN 214 PERUMNAS CIJERAH
36	SDN 216 SONDARIAH
37	SDN 218 SARIJADI
38	SDN 222 PASIRPOGOR
39	SDN 225 MEKARGALIH
40	SDN 227 MARGAHAYU UTARA

41	SDN 228 CANGKUANG
42	SDN 231 SUKAASIH
43	SDN 232 BLOK SAWAH
44	SDN 234 SALUYU
45	SDN 237 KOPO ELOK
46	SDN 238 CIGONDEWAH
47	SDN 239 CIGONDEWAH
48	SDN 250 JAKAPURWA
49	SDN 253 PANGGUNGSARI
50	SDN 256 CIGONDEWAH HILIR
51	SDN 262 PANYILEUKAN
52	SDN 266 MENGGER
53	SDN 268 PANYILEUKAN
54	SDN 273 GEMPOLSARI

Lampiran 4.2 Sekolah Menengah Pertama Perbatasan

NO	NAMA SEKOLAH
1	SMPN 12
2	SMPN 16
3	SMPN 18
4	SMPN 26
5	SMPN 29
6	SMPN 35
7	SMPN 38
8	SMPN 39
9	SMPN 46
10	SMPN 47
11	SMPN 48
12	SMPN 50
13	SMPN 51
14	SMPN 52
15	SMPN 53
16	SMPN 54
17	SMPN 55
18	SMPN 57

WALI KOTA BANDUNG,

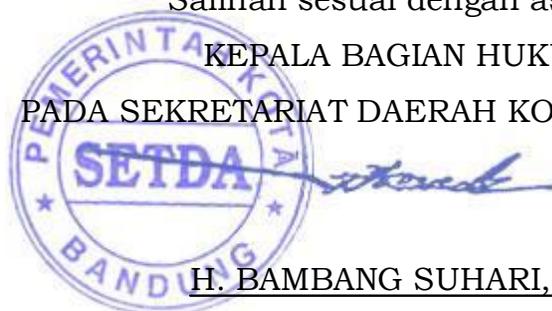
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H

NIP.19650715 198603 1 027